

**Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi
Tahun 2024-2026**

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)	Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks (Nilai)	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan</p>	<p>{Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4</p> <p>Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Nilai Rataan{(Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer + Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD} x 5 (Indeks) Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks) Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital : <u>Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital</u> x 5 (Indeks) Jumlah Data Sektoral pada PD Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi {(Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi x 0,8) + (Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian x 0,2):100} x 5 (Indeks) =(Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi + Jumlah Indeks Kesadaran Keamanan Informasi Aparatur Pemerintah Kota Bekasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi + Jumlah Sertifikasi Keamanan Informasi + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Fasilitas Teknologi Keamanan Informasi + Jumlah Ruang yang Aman dari Kebocoran Informasi yang Berklasifikasi + Jumlah Aparatur yang Menerbitkan Sertifikasi Elektronik + Persentase Jumlah Aplikasi yang akan menggunakan Sertifikasi Elektronik (Tanda Tangan Elektronik)) + Persentase Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi dan Pemenuhan Alat Pendukung dan Utama Persandian</p>	Kepala Dinas Diskominfostandi	Diskominfostandi

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Pendayagunaan Telematika di Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p>	<p>Hasil Survey Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat -*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang -**) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 - NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai perunsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$ - NRR = NRR per unsur x 0,011 		

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);</p> <p>Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/066/Bangda tanggal 07 Januari 2019 Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan,</p>			

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
				<p>Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfostandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.3/Kep.83-Diskominfostandi/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi.</p>			

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggung Jawab	Sumber Data
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	Nilai	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil Evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan Peringkat.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat : AA (>90-100) A (>80-90) BB (>70-80) B (>60-70) CC (>50-60) C (>0-30) </div>	Kepala Dinas Diskominfostandi	Diskominfostandi

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK, DAN PERSANDI



Drs. HUDI WIJAYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690121 199007 1 001

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun			Kondisi Akhir RENSTRA
							2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks (Nilai)	4,01	4,09	4,47	4,87	4,87
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	Nilai	76,06	77,50	77,65	77,75	77,75

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK, DAN PERSANDI



Drs. HUDI WIJAYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690121 199007 1 001